

**PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 9 TAHUN 1975
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi)**

SKIRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI)**



OLEH:

A S K A R
NIM: 10621003687

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2 0 1 1

SKIRIPSI

PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi)

**Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI)**



OLEH:

ASKAR
NIM: 10621003687

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI)”.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan, yang di dalamnya terdapat ketentuan tentang pencatatan perkawinan.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana tata cara pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, dan bagaimana tinjauan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, untuk mengetahui faktor penghambat dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi dan untuk mengetahui tinjauan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

Dalam penelitian ini populasinya adalah 2 orang pegawai KUA Kecamatan Lembah Sorik Marapi, 7 orang Pembantu Penghulu di desa-desa. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, wawancara dan angket.

Setelah dilakukan penelitian, penulis menemukan bahwa tata cara pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi melalui beberapa tahap, yaitu pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan buku nikah. Faktor penghambat dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi adalah adanya pasangan yang nikah lari, kurangnya pegawai dan rendahnya pengetahuan pembantu penghulu dan masyarakat terhadap Undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara umum berjalan dengan semestinya, namun banyak hambatan dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga ditakutkan akan terdapat pelanggaran, terutama karena kurangnya pegawai KUA kecamatan Lembah Sorik Marapi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi	16
B. Stuktur Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi	19
C. Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi	21

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975	
A.	Sejarah Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ..	23
B.	Isi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.....	26
C.	Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975	33
BAB IV	PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI	
A.	Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi.....	43
B.	Faktor Penghambat dalam Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi	55
C.	Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi.....	62
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran.....	74
	DAFTAR PUSTAKA.....	75
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Lembah Sorik Marapi terletak di Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara. Kecamatan ini masih tergolong baru, karena baru dimekarkan pada tahun 2004 dari kecamatan Kotanopan. Kecamatan ini terdiri dari 10 desa.¹

Tidak lama setelah terbentuknya kecamatan ini maka dibentuk juga Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan ini. Struktur kepegawaian yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi terdiri dari kepala dan wakil kepala Kantor Urusan Agama sekaligus sebagai Penghulu, ditambah dengan Pembantu Penghulu (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) di hampir semua desa, yaitu sebanyak 7 orang².

Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 20 dan 14A Tahun 2005 Bab I Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa:

Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/ rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan³.

¹ M. Alwi, Camat Lembah Sorik Marapi, *Wawancara*, 22 Maret 2010.

² Syamsir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, *Wawancara* 22 Maret 2010.

³ Departemen Agama R.I, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Ikhlas Beramal, 2005) cet. Ke-1, h. 1.

Salah satu tugas dari Penghulu adalah mencatat perkawinan, sebab perkawinan hanya dianggap sah apabila perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku⁴.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975⁵ penghulu dikenal dengan sebutan Pegawai Pencatat. Ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan rujuk). Adapun instansi dimaksud adalah:

- 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak dan Rujuk bagi yang beragama Islam.
- 2) Kantor Catatan Sipil untuk selain yang beragama Islam⁶.

Menurut Ahmad Rofiq, tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi percekokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka pihak lain dapat melakukan upaya hukum guna memertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Cet. Ke. 1, h. 14.

⁵ Peraturan Pemerintah (PP) NO. 9 Tahun 1975 adalah Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. PP ini berlaku sejak 1 April 1975. Lihat: Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), h.119

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. Ke 1, h.14

tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan⁷.

Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan dapat mendaftarkan dirinya atau didaftarkan oleh orang tuanya kepada pegawai pencatat nikah untuk diumumkan selama sepuluh hari.

Hal ini sesuai dengan pasal 3, 8 dan 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu:

Pasal 3:

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 10 ayat (1)

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini⁸.

Namun dengan berbagai pertimbangan, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi terkadang kehendak perkawinan tidak diumumkan.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. Ke-3, h. 107

⁸ Muhammad Amin Suma, *op. cit*, h. 547-549.

Penyebab kehendak perkawinan tidak diumumkan di Kecamatan Lembah Sorik Marapi antar lain banyaknya praktek nikah lari, karena kalau tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum Islam, seperti berduaan di rumah⁹.

Atas dasar inilah penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimanakah pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi mengingat adanya kejadian seperti di atas.

Maka penulis membuat permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul : "PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi)".

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi masalah ini dengan memfokuskan pada Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi ditinjau menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dilaksanakan tahun 2008.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi?

⁹ Syamsir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, *Wawancara* 29 Maret 2010

2. Apa faktor penghambat dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi ?
3. Bagaimana tinjauan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan bagi penulis tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Lembah Sorik Marapi.
- b. Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam dari Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- c. Sebagai sumbangsih penulis terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu syariah khususnya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah kepala dan wakil kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi sebagai penghulu dan ke-7 orang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di desa-desa. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi ditinjau menurut PP No. 9 Tahun 1975.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasinya terdiri dari 1 orang kepala dan 1 orang wakil kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi sebagai penghulu, dan 7 orang Pembantu Penghulu di desa-desa. Karena jumlah populasinya sedikit maka penulis mengambil semuanya dan tidak menggunakan sampel.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden, yaitu 1 orang kepala dan 1 orang wakil kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

Sorik Marapi sebagai penghulu, dan 7 orang Pembantu Penghulu di Desa-Desa

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari berbagai buku yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dalam mengumpulkan data dari lapangan penulis menggunakan dua cara, yaitu:

- a. Observasi, yaitu dengan mengamati masalah yang diteliti secara langsung dengan pergi ke lokasi penelitian, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan lembah Sorik Marapi
- b. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan lisan kepada 1 orang kepala dan 1 orang wakil kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi serta 7 orang pembantu penghulu di desa-desa tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

6. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data digunakan metode analisa data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif artinya mengelompokkan data yang terkumpul melalui observasi dan wawancara kedalam kategori yang tertentu, sesuai dengan persamaan dan jenis data tersebut. Kemudian antara satu data dengan data lain dihubungkan dan dibandingkan, lalu data tersebut

dianalisa, baik dengan membandingkan data-data tersebut, pendekatan teori kosep, maupun pendapat para ahli.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian ini, maka data-data tesebut ditulis dengan menggunakan metode:

- a. Metode deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode induktif, yaitu menggambarkan data-data khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode deskriptif, yaitu menjelaskan data-data yang terkumpul dengan apa adanya untuk menjawab permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam memahami pembahasan penelitian ini penulis akan memaparkannya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Lembah Sorik Marapi, yang berisi sejarah berdirinya KUA Kecamatan Lembah Sorik Marapi, struktur KUA serta tugas dan fungsi KUA.

BAB III : Tinjauan Umum tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, berisikan sejarah lahirnya, isi, dan tata cara pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV : Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan

Agama kecamatan Lembah Sorik Marapi, yang berisi tata cara pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, faktor penghambat dan pendukung dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, dan tinjauan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi

BAB V : Kesimpulan, kritik dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi

Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai sejarah yang cukup panjang di Indonesia, baik berkenaan dengan kelembagaan maupun peran dan fungsinya. Keberadaannya dapat dilacak sejak permulaan masuk Islam ke Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan kerajaan/kesultanan Islam, masa kolonialisme, hingga masa kemerdekaan. Sepanjang itu KUA mengalami dinamika dalam transformasi kelembagaan, peran dan fungsinya¹.

Menurut Daniel S. Lev, Sejarah tentang berdirinya Kantor Urusan Agama di Indonesia, berawal dari Departemen Agama melakukan tindakan kearah unifikasi dan sentralisasi secara integral. Kunci utama dalam usaha itu adalah pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA). KUA dibentuk di seluruh daerah sebagai cabang dari Kantor Pusat Nasional yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang di Jawa, menggantikan Kantor Voor in Landsche Zaken, yang pada waktu itu mempunyai cabang di keresidenan. Departemen Agama sekarang membentuk KUA di daerah dengan jawatan pusat di Jakarta, Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Sedang ditingkat desa ada juga pejabat agama yang tidak termasuk dalam hierarkinya. Sambil melayani tugas-tugas yang bersifat politik maupun hukum agama, maka KUA di Kabupaten dan Kecamatan biasa menjadi Pusat

¹ Departemen Agama, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), Cet. Ke. 1, h. 23

kegiatan Islam. Pada Tahun 1950 pengawasan terhadap pejabat ini berada di tangan pemimpin-pemimpin Nahatul Ulama (NU) setempat².

Keberadaan KUA sebagai ujung tombak Departemen Agama dalam pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat di tingkat paling bawah sayangnya masih belum ditangani secara maksimal. Pada hal dalam praktiknya mereka dituntut tanggung jawab yang lebih besar dari kuantitas pekerjaan yang semestinya mereka lakukan.

Hasil penelitian Puslitbang kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama (2003), mengungkapkan bahwa jangankan untuk mengembangkan peran-peran yang lain, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang sudah ada pun ternyata belum bisa optimal. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kinerja KUA yang disebabkan oleh penyebaran Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak merata baik secara kuantitas maupun kualitas. Ada sebagian KUA yang ditempati oleh para pegawai yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang cukup dan terkadang berlebih jumlahnya, tetapi ada juga yang sebaliknya³.

Kecamatan Lembah Sorik Marapi dibentuk pada tahun 2004. Sebelumnya kecamatan ini merupakan bagian dari kecamatan Kotanopan, yaitu di Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara. Di kecamatan ini terdapat 10 desa⁴.

² Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam Indonesia*, Penerjemah: Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: PT Intermasa, 1986), Cet. Ke. 2. h. 99

³ *Ibid.* h. 34

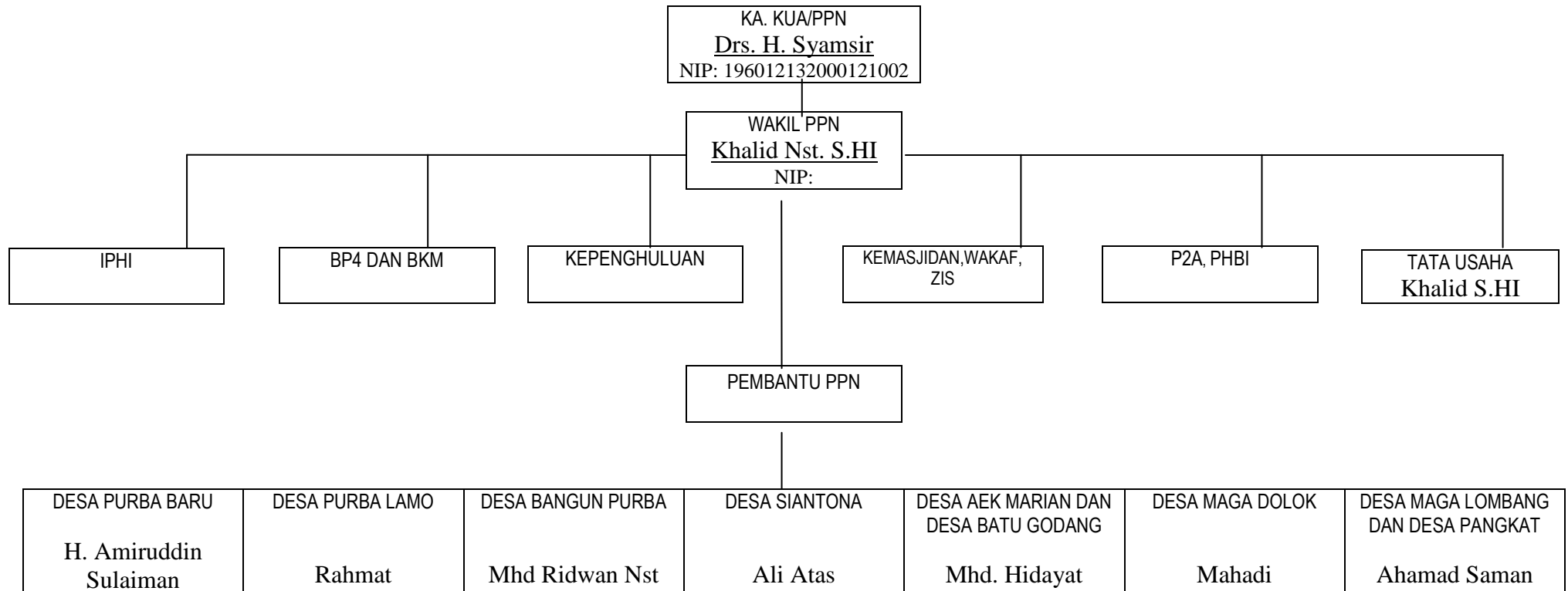
⁴ Alwi Nur Lubis, Camat Lembah Sorik Marapi, *Wawancara*, 06 September 2010

Setelah Kecamatan Lembah Sorik Marapi dibentuk, maka dibentuk juga Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Lembah Sorik Marapi, dengan Kepala KUA yang pertama Drs. Muhammad Yazid. Kantornya yang pertama terletak di Jalan Medan-Padang no 01, Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi, dengan menyewa salah satu rumah penduduk. Baru pada tahun 2009 berdiri gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, dengan ukuran 7 x 15 m², yakni di Jalan Raja Enda kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing, Natal Propinsi Sumatera Utara⁵.

⁵ Syamsir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, *Wawancara*, 06 September 2010

B. Struktur Kantor Urusan Agama Lembah Sorik Marapi

STRUKTUR TUGAS DAN PERSONALIA PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI



Keterangan:

1. Kepala KUA : Drs. H. Syamsir
2. Wakil Kepala KUA : Drs. H. Syamsir
3. Kepala Tata Usaha : Khalid S.HI
4. IPHI/PHBI :
5. BP4 DAN BKM :
6. Kepenghuluan :
7. Kemasjidan,Wakaf, ZIS :
8. Tata Usaha :

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Desa-Desa:

No	Nama	Desa
1	H. Amiruudin sulaiman	Purbabaru
2	Rahmat	Purba Lamo
3	Mhd Ridwan Nst	Bangun Purba
4	Ali Atas	Siantona
5	Mhd. Hidayat	Aek Marian Dan Batu Godang
6	Mahadi	Maga Dolok
7	Ahmad Saman	Maga Lombang Dan Pangkat ⁶

⁶ Syamsir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, *Wawancara*, 06 September 2010

C. Tugas Kantor Urusan Agama Lembah Sorik Marapi

Adapun tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Lembah Sorik Marapi adalah sama dengan Kantor Urusan Agama lainnya, yaitu:

1. Tugas Administrasi dan Ketatausahaan
2. Pencatatan, Pelaksanaan dan Pelaporan NTCR (tugas kepenghuluan)
3. Tugas Kemasjidan dan Perwakafan
4. Tugas Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4)
5. Tugas Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Beragama (P2A)
6. Tugas Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) serta kegiatan dan pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan
7. Tugas Pembinaan dan Pelaksanaan Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS)
8. Tugas Pembinaan dan bimbingan IPHI
9. Tugas Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama
10. Tugas Pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)
11. Tugas Pembinaan dan Bimbingan Pelaksanaan Jenazah
12. Tugas Pembinaan Kepegawaian dan Dharma Wanita
13. Dan tugas-tugas lain yang ada kaitannya dengan tugas Kantor Urusan Agama Lembah Sorik Marapi⁷.

⁷ Departemen Agama R.I, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), h. 25

Semua tugas di atas merupakan tugas setiap Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, dan tugas itu pulalah yang menjadi tugas pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi⁸.

Dalam tugas kepenghuluan, sesuai dengan Bab II pasal 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 TENTANG Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya Tugas Pokok Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihat dan konsultasi nikah/rujuk, pemantaunan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat, bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan⁹.

⁸ Syamsir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, *Wawancara*, 06 September 2010

⁹ *Ibid*

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975

A. Sejarah Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini sendiri lahir setelah disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 22 Desember 1973, setelah beberapa kali sidang selama tiga bulan. Undang-Undang Perkawinan ini diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974¹.

Hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dengan sendirinya menjadi sumber bagi Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan undang-undang tersebut, yaitu:

1. Hukum Agama, dalam hal ini adalah Hukum Perkawinan Islam atau *Fiqh Munakahat*, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam dan warga timur asing yang beragama Islam.
2. Hukum adat, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang tidak beragama Islam atau Kristen berlaku Hukum Adat masing-masing lingkaran adat dan bagi orang timur asing lainnya berlaku Hukum Adatnya.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Cet. Ke. 1, h. 21

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku bagi orang timur asing Cina, orang Eropa, dan warga negara Indonesia keturunan Eropa.
4. *Huwelijksordonantie Christen Indonesia*, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen.

Adanya keinginan untuk menciptakan hukum yang bersifat unifikasi di satu sisi, dan kenyataan kesadaran hukum masyarakat yang telah diwarnai oleh agama yang berbeda yang dituntut untuk diikuti dalam pembinaan hukum di sisi lain, maka sifat dari Undang-Undang Perkawinan itu tidak dapat dihindarkan harus unifikasi yang bervariasi².

Dalam konsensus proses penyusunan Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa tidak dikandung maksud untuk mengubah hukum agama. Oleh karena itu, rumusan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan dihilangkan apabila ternyata bertentangan dengan hukum Islam dan tidak dapat dikompromikan³.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu tanggal 02 Januari 1974, merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensi sendiri, tanpa harus diresipir oleh hukum adat. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat (2) sampai

² *Ibid*, h. 23-24.

³ Rachmad Djanika dkk, *Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), h.144

saat ini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan. Karena itu sosialisasi perlu terus menerus dilakukan dan berkesinambungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disahkan lebih kurang 15 bulan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan diundangkan, yakni pada tanggal 1 April 1975 oleh Soeharto (Presiden Republik Indonesia saat itu)⁴. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975.

Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama,

⁴ Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke. 1, h. 127

Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut⁵.

B. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdiri dari 10 bab dan 49 pasal. Pelaksanaan yang diatur dalam peraturan ini terapat dua bagian, yaitu: pelaksanaan yang berhubungan dengan pelaksanaan nikah yang menjadi tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pengadilan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Peradilan Umum bagi warga negara yang non-muslim dan Peradilan Agama bagi yang muslim. Pelaksanaan terhadap hal terakhir ini dilaksanakan pada beberapa persoalan hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan perkawinan dan perceraian⁶.

Adapun materi pokok dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Keterangan Umum

Dalam ketentuan umum peraturan ini dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan pengadilan adlah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum

⁵ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 560

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. Ke 1, h. 21

sedangkan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Yang dimaksud dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Pencatat Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan bagi umat Islam dan catatan sipil bagi nonmuslim⁷.

2. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan akan dibahas dalam sub-bab tersendiri.

3. Tata Cara Perkawinan dan Akta Perkawinan

Bagi seseorang yang bermaksud melangsungkan perkawinan terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah. Pemberitahuan ini boleh dilakukan oleh orangtua atau walinya. Pegawai pencatat perkawinan setelah menerima pemberitahuan tersebut segera meneliti syarat-syarat perkawinan apakah terpenuhi atau belum, apakah ada halangan kawin menurut agama dan undang-undang, demikian surat-surat yang dijadikan syarat administrasi sudah terpenuhi atau belum. Jika belum cukup syarat-syarat yang diperlukan, maka Pegawai Pencatat Nikah segera memberitahukan kepada yang bersangkutan agar segera dipenuhi, kecuali dalam hal terdapat halangan kawin menurut agama dan Undang-Undang maka Pegawai Pencatat wajib menolaknya. Jika syarat-syarat nikah telah memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh ketentuan yang berlaku, maka pegawai pencatat nikah membuat pengumuman tentang pemberitahuan yang mudah dibaca khalayak ramai (umum). Pengumuman yang serupa harus ditempelkan pada Kantor Pegawai Pencatat Nikah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing calon mempelai jika mereka berlainan

⁷ *Ibid*, h. 22

tempat tinggal. Perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah hari kesepuluh setelah pengumuman tersebut ditempelkan. Ketentuan ini dimaksud untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang menurut pendapatnya perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada halangan menurut undang-undang atau tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh peraturan perundangan yang berlaku⁸.

Perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Perkawinan harus pula dihadiri oleh saksi dan dihadiri pula oleh Pegawai Pencatat Nikah. Bagi mereka yang melaksanakan perkawinannya menurut agama Islam, akad nikahnya dilaksanakan oleh wali atau yang mewakilinya. Sesaat setelah berlangsungnya perkawinan tersebut maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, seterusnya ditandatangani pula oleh saksi-saksi, wali nikah dan pegawai pencatat yang bertugas untuk mencatat perkawinan tersebut. Setelah selesai penandatanganan akta nikah tersebut, maka perkawinan yang dilaksanakan itu telah dianggap sah dan telah tercatat secara resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku⁹.

4. Tata cara Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 menerangkan bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Kemudian pada pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya

⁸ *Ibid*, h. 24

⁹ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. Ke. 2, h. 24

dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga¹⁰.

¹⁰ Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, h. 551

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan antara cerai talak dan cerai gugat. Cerai gugat diajukan ke Pengadilan oleh istri, sedangkan cerai talak diajukan oleh suami ke Pengadilan dengan memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya dengan suatu alasan yang telah disebutkan.

1) Cerai Talak

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cerai talak tidak diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaiannya cukup dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 hanya mengatur tentang pencatatannya saja, tidak mengenai prosedurnya. Cerai talak baru diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam bagian sendiri dengan sebutan “cerai talak”¹¹, demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama lebih mempertegas lagi tentang keberadaan cerai talak ini, yaitu pasal 66-72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989¹².

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang istri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Dalam perkawinan menurut agama Islam dapat berupa karena suami melanggar taklik talak, gugatan karena *syiqaq*, gugatan karena fasakh, dan gugatan karena alasan-alasan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah

¹¹ Abdul Manan, *Op. Cit*, h. 26

¹² Andi Tahir Hamid, *Op. Cit*, h. 29

Nomor 9 Tahun 1975. Meskipun cerai gugat ini diperuntukkan untuk istri, tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, lembaga cerai ini dapat dipergunakan oleh suami untuk menggugat istri ke pengadilan agar perkawinan mereka dibubarkan sebab suami telah berpindah agama (*riddah*). Di sini suami tidak diperkenankan untuk menggunakan lembaga cerai talak, karena lembaga ini hanya diperuntukkan untuk perceraian yang dilaksanakan secara lisan¹³.

5. Masa Tunggu (Iddah)

Masa tunggu atau iddah tergantung waktu dimana seorang janda tidak diperkenankan untuk menerima pinangan atau lamaran dari laki-laki lain, atau juga melakukan pernikahan dengan laki-laki lain selama masa tertentu. Dalam istilah *fuqaha* iddah adalah masa menunggu wanita ehinga halal bagi wanita yang lain¹⁴. Masa tunggu dimaksudkan untuk menentukan nasab dari kandungan handa itu apabila ternyata ia hamil. Masa tunggu ini juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada bekas suami untuka rujuk lagi dengan bekas istrinya (hal ini dapat dilakukan kalau perkawinan putus karena talak *raj'i*). masa tunggu juga dilakakukan untuk memberikan kesempatan kepada janda kepada janda untuk berkabung setelah meninggal suaminya, hal ini bila perkawinan putus karena kematian suaminya. Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena kematian, maka massa tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari dihitung sejak suami meninggal

¹³ *Ibid*

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), terj. Abdul Majid Khon, cet. Ke. 1, h. 318

dunia. Jika perkawinan putus karena perceraian maka masa tunggu ditetapkan bagi yang masih datang bulan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, dan tidak ada masa tunggu bagi perkawinan yang putus dan belum pernah terjadi hubungan kelamin¹⁵.

6. Beristri Lebih dari Satu Orang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh seseorang dan dibenarkan oleh agamanya, maka perkawinan lebih dari seorang dapat dibenarkan, asalkan alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan terpenuhi beristrikan lebih dari seorang baru dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama. Dalam pasal 4-5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 disebutkan bahwa apabila seseorang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan, yaitu:

- bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Alasan ini boleh bersifat alternatif dan akan lebih bagus lagi kalau bersifat kumulatif¹⁶.

¹⁵ Abdul Manan, *Op. Cit*, h. 30

¹⁶ *Ibid*, h. 31

7. Tentang Perkara yang Lain-Lain

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara implisit telah menentukan perkara-perkara perkawinan yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama. Namun demikian lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mempertegas kembali tentang wewenang absolut Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan yang berhubungan dengan perkawinan umat Islam¹⁷.

C. Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Seperti dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁸.

¹⁷A.Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. Ke 1, h. 139

¹⁸ Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, h.522

Di negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian. Adapun dua lembaga yang dimaksud adalah:

- 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak dan Rujuk bagi yang beragama Islam.
- 2) Kantor Catatan Sipil untuk selain yang beragama Islam¹⁹.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang mengatur tentang pencatatan perkawinan terdapat dalam BAB II, yang terdiri dari 8 pasal yang dimulai dari pasal 2 sampai pasal 9. Berikut ini bunyi pasal 2 sampai 9:

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

¹⁹ Abdul Manan, *Op. Cit*, h. 22

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6

(1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;

b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;

c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;

e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;

f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;

g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;

h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

(1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;

b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan²⁰.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kelalaian dalam mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatatan

²⁰ Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, h. 547-549

tersebut. Salah satu kegunaan dari pencatatan perkawinan ini adalah untuk mengontrol dengan konkrit tentang data nikah, talak, dan rujuk²¹.

Dalam syari'at Islam tidak diatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat tentang muamalah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia mengaturnya²².

Memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah karena standar sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melakukan kelalaian kewajibannya, maka pihak yang lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja keadaan demikian bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri²³.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum, juga mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan suatu perkawinan. Ada dua manfaat dari pencatatan perkawinan: yakni manfaat preventif dan represif.

²¹ Abdul Manan, *Op. Cit*, h. 23

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. Ke 3, h. 107

²³ *Ibid*, h. 110

Manfaat preventif yaitu, untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan²⁴. Dalam bentuk konkritnya, bentuk penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah²⁵.

Tata cara pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya (pasal 4). Adapun hal-hal yang diberitahukan meliputi: nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah satu atau kedua calon mempelai pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (pasal 5). Dengan adanya pemberitahuan ini, kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pemalsuan identitas dapat dihindari²⁶.

Tindakan yang harus diambil Pegawai Pencatat setelah menerima pemberitahuan, diatur dalam pasal 6 sebagai berikut:

²⁴ *Ibid*, h. 111

²⁵ Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, h. 547

²⁶ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h. 112

(1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;

b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;²⁷

Ketentuan dalam klausul pasal 6 ayat (1) dan (2) di atas memberi manfaat, pertama, memelihara ketertiban hukum yang menyangkut kompetensi relatif - kewilayahan- dari Pegawai Pencatat Nikah. Kedua, menghindarkan pemalsuan atau penyimpangan hukum lainnya, seperti identitas calon mempelai, umur dan status perkawinan mereka, termasuk misalnya kemungkinan terjadinya perbedaan agama yang mereka anut. Lebih dari itu, dalam kaitannya dengan program pemerintah yang ingin membangun dan mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas, penelitian umur calon mempelai sangat penting. Karena tidak jarang terjadi - terutama di kampung-kampung yang memegang kuat tradisi bahwa mempunyai anak perawan tua/kasip dapat menjadi aib – pemalsuan umur sering terjadi. Belum lagi kemungkinan dampak yang timbul, akibat kawin muda yang mendominasi banyaknya banyaknya kasus perceraian di beberapa Pengadilan Agama. Karena itulah ketelitian pegawai pencatat menjadi faktor kunci, agar tidak terjadi penyimpangan. Dan yang tidak kalah pentingnya, lurah

²⁷ Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, h. 548

atau kepala desa yang dianggap mengetahui identitas, atau usia calon mempelai, peranannya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemalsuan sangat besar²⁸.

Mengingat kesadaran masyarakat yang menjadi subyek hukum tidak sama, mungkin karena tidak tahu atau mungkin karena hal lain, sehingga ketentuan-ketentuan di atas belum berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan memberi alternatif – kelonggaran- kepada pihak-pihak karena suatu hal harus segera melangsungkan perkawinan, yaitu mengajukan izin tertulis ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.

Penelitian Pegawai Pencatat juga bermaksud untuk meneliti status perkawinan seseorang baik calon suami atau calon istri. Oleh karena itu, jika diperlukan calon mempelai melampirkan surat-surat sebagai berikut:

- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h.113

Hasil penelitian Pegawai Pencatat, kemudian ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975). Akan tetapi, apabila hasil penelitian menunjukkan adanya halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belum terpenuhi persyaratan seperti diatur pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pegawai pencatat memberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (pasal 7 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975). Langkah ini diambil agar pihak-pihak terkait, bagi calon mempelai dapat segera memenuhinya, dan bagi pihak yang keberatan dapat mengajukan keberatannya.

Setelah terpenuhinya persyaratan dan tata caranya serta tidak terdapat halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan. Caranya dengan menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan, ditempel pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975). Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan ²⁹.

²⁹ *Ibid*, h. 114.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kelalaian dalam mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatatan tersebut. Salah satu kegunaan dari pencatatan perkawinan ini adalah untuk mengontrol dengan konkrit tentang data nikah, talak, dan rujuk³⁰.

³⁰ Abdul Manan, *Op. Cit*, h. 23

BAB IV

PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN

AGAMA KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI

A. Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi

Tata cara atau proses pencatatan perkawinan/nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan buku nikah.

a. Pemberitahuan kehendak nikah

Pemberitahuan kehendak nikah kepada penghulu/pembantu penghulu dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua dengan membawa surat-surat yang diperlukan, yaitu:

- 1) Surat persetujuan calon mempelai
- 2) Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asla-usul calon mempelai
- 3) Surat keterangan tentang orang tua
- 4) Surat keterangan untuk nikah (Model N 1)
- 5) Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota TNI/POLRI\

- 6) Akta cerai talak/ Cerai Gugat atau Kutipan Pendaftaran Talak/Cerai jika calon mempelai seorang janda/duda.
- 7) Surat keterangan kematian suami atau istri yang dibuat oleh kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri, jia calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri.
- 8) Dispensasi dari pengadilan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2)
- 9) Surat dispensasi dari camat bagi perkawinan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman
- 10) Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu
- 11) Setelah persiapan pendahuluan dilakukan dengan matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada penghulu yang mewilayahi tempat akan dilaksanakannya akad nikah, sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan
- 12) Bagi warga negara asing, harus melampirkan surat-surat antara lain: Paspor, Surat izin dari kedutaaan dan surat status dari catatan sipil negaranya¹.

b. Pemeriksaan Nikah

Penghulu atau Pembantu Penghulu yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa dan meneliti calon suami, calon istri dan wali nikah

¹Syamsir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, *Wawancara* 20 September 2010.

tentang ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik dari segi hukum munakahat maupun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan².

Hasil penelitian Penghulu/pembantu penghulu, kemudian ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Akan tetapi, apabila hasil penelitian menunjukkan adanya halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belum terpenuhi persyaratan, maka penghulu/pembantu penghulu memberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya. Langkah ini diambil agar pihak-pihak terkait, bagi calon mempelai dapat segera memenuhinya, dan bagi pihak yang keberatan dapat mengajukan keberatannya.

Penghulu/pembantu penghulu harus teliti dalam memeriksa surat-surat yang dibawa oleh calon mempelai ketika pemberitahuan kehendak nikah, untuk menghindari adanya pemalsuan data.

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah pemeriksaan nikah selesai dilakukan dan tidak ada masalah, maka penghulu/pembantu penghulu mengumumkan kehendak nikah. Pengumuman kehendak nikah ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, dan papan pengumuman Kantor Urusan Agama tempat tinggal calon mempelai, jika salah satu calon mempelai berasal dari luar wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Serta di tempat yang mudah dibaca oleh umum kalau pemberitahuan kehendak nikah

² *Ibid*

itu kepada Pembantu Penghulu. Idealnya, pengumuman dilakukan selama 10 hari kerja, kecuali ada dispensasi dari camat karena alasan penting. Dalam 10 hari tersebut diadakan pensehatan terhadap kedua calon mempelai³.

d. Pelaksanaan akad nikah

Pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Lembah Sorik Marapi dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pada hari pelaksanaan akad nikah kedua calon pengantin telah menghadirkan wali, saksi dan orang lain yang dianggap perlu
- b. Setelah selesai akad nikah, pengantin pria dan wanita, para saksi, dan wali nikah menandatangani akta nikah
- c. Setelah selesai pelaksanaan akad nikah, maka penghulu/ pembantu penghulu memberikan nasehat perkawinan bagi kedua pengantin yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri
- d. Penyerahan mahar kepada pihak istri
- e. Bersalam-salaman
- f. Penghulu membuatkan Buku Nikah (model NA) rangkap dua, masing-masing untuk suami dan istri
- g. Buku nikah diserahkan kepada suami Istri⁴.

³Syamsir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, *Wawancara* 20 September 2010.

⁴*Ibid*

Pelaksanaan akad nikah ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada karena telah sesuai dengan buku pedoman penghulu yang menjadi rujukan setiap penghulu disetiap Kantor Urusan Agama⁵.

B. Faktor Penghambat Dalam Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi

Ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi yaitu:

1. Banyaknya pasangan yang nikah lari

Banyak perkawinan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi adalah dengan nikah lari. Nikah lari dalam adat Mandailing disebut dengan “*marlojong*” . Marlojong adalah sebuah cara melakukan perkawinan yang legal dalam adat Mandailing. Adat Marlojong ini seperti mendapat legitimasi dari tokoh adat setempat, dan merupakan hal yang lazim dalam melaksanakan pernikahan, walaupun memang adat ini sudah mulai berkurang kalau dibandingkan dengan zaman dahulu.

Proses penyelesaian nikah lari secara adat mandailing melalui beberapa proses, yaitu “*mandok ulang agoan*” (pemberitahuan dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga pihak perempuan bahwa anak mereka telah melakukan nikah lari), “*mangobari tuor*” (yaitu proses negoisasi tentang jumlah uang hantaran dan jumlah mahar, proses ini dilakuan setelah proses “*mandok ulang agoan*” selesai). Proses selanjutnya adalah “*patibal sere*” (penyerahan uang hantaran).

⁵ Departemen Agama R.I, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), h. 43.

Keseluruhan dari proses ini biasanya memakan waktu hingga 2 minggu, bahkan ada yang sampai 1 bulan, tergantung dari cepatnya proses negoisasi besarnya uang hantaran. Setelah semua proses tersebut selesai, barulah akad nikah dapat dilaksanakan⁶.

Banyaknya masyarakat yang melakukan nikah lari, sangat berpengaruh terhadap pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Seperti dituturkan oleh Syamsir, kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Lembah Sorik Marapi Menarik kembali anak yang sudah lari dengan pasangannya merupakan hal yang sangat tabu (bahkan mustahil karena hal seperti ini dianggap aib) bagi masyarakat Mandailing, sehingga bagaimanapun anak yang sudah lari dengan pasangannya harus dinikahkan⁷.

2. Kurangnya Pegawai Kantor Urusan Agama

Jumlah pegawai yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi hanya 2 orang, dan keduanya berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Akibatnya harus ada rangkap jabatan, sehingga banyak tugas yang menumpuk dan menjadi lambat dalam menyelesaikan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

⁶ Abdul Wahid Nasution, Tokoh Adat Desa Pasar Maga, *Wawancara*, 21 September 2010

⁷ *Ibid*

Sebagai contoh, kurangnya pegawai mengakibatkan jarangya dilakukan penasehatan perkawinan bagi calon memepelai, dan kurangnya pelatihan kepada pembantu penghulu tentang pencatatan perkawinan⁸.

3. Kurangnya Pengetahuan Pembantu penghulu dan masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan

Para pembantu penghulu di desa-desa kebanyakan adalah alumni pesantren, yang dalam pendidikannya menekankan pendidikan agama. Secara umum, pengetahuan pembantu penghulu terhadap hukum perkawinan menurut Islam cukup memadai. Sebaliknya pengetahuan mereka terhadap peraturan dan perundang-undangan perkawinan yang berlaku masih rendah. Hal ini menurut kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi karena jarangya pelatihan dan penyuluhan dilakukan kepada para pembantu penghulu, karena jumlah pegawai yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi yang sangat sedikit⁹.

Dari hasil wawancara penulis dengan seluruh pembantu penghulu di desa-desa kecamatan Lembah Sorik Marapi, mereka mengatakan bahwa mereka kurang tahu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena jarang ada sosialisasi undang-undang perkawinan atau peraturan pemerintah lainnya.

⁸ *Ibid*

⁹ Syamsir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, *Wawancara* 21 September 2010

Begitu juga dengan masyarakat, kurang tahu dengan undang-undang perkawinan atau peraturan pemerintah lainnya, karena memang tidak ada sosialisasi sama sekali.

Pengaruh kurangnya pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi hanyalah kepada kurangnya sosialisasi undang-undang perkawinan dan kurangnya penyuluhan/ pelatihan yang dilakukan kepada pembantu penghulu dan masyarakat di desa-desa, bukan secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan pencatatan perkawinan. Namun demikian, dengan kurangnya sosialisasi undang-undang perkawinan kurangnya penyuluhan/ pelatihan yang dilakukan kepada pembantu penghulu dan masyarakat di desa-desa, membuat pembantu penghulu dan masyarakat tidak tahu dengan undang-undang perkawinan.

C. Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita¹⁰.

Selanjutnya dalam ayat (1) pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa seorang pegawai pencatat nikah harus meneliti syarat-syarat perkawinan yang diajukan oleh orang yang akan melangsungkan pernikahan:

Pasal 6

(1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

Kemudian pada ayat (2) pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan:

(2). Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;

Dari pasal ini diketahui bahwa umur calon mempelai harus diteliti kebenarannya oleh Penghulu/ Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Penelitian ini

¹⁰ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 524

tentu saja dimaksudkan untuk menghindari adanya pemalsuan umur, yang pada akhirnya akan mencegah perkawinan di bawah umur.

Hasil penelitian Penghulu/pembantu penghulu, kemudian ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975). Akan tetapi, apabila hasil penelitian menunjukkan adanya halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belum terpenuhi persyaratan seperti diatur pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka penghulu/pembantu penghulu memberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (pasal 7 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975). Langkah ini diambil agar pihak-pihak terkait, bagi calon mempelai dapat segera memenuhinya, dan bagi pihak yang keberatan dapat menagajukan keberatannya.

Pada pasal 8 huruf b, poin 3, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor; PER/ 62 /M.PAN/6/ 2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, juga disebutkan bahwa salah satu tugas Penghulu adalah meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah dan saksi nikah¹¹.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Ahmad Rofiq bahwa ketelitian seorang pegawai pencatat nikah merupakan kata kunci dalam menghindarkan pemalsuan umur calon mempelai. Tentu saja di samping itu kejujuran dan ketelitian dari kepala desa dan lurah¹².

Ketentuan dalam klausul pasal 6 ayat (1) dan (2) di atas memberi manfaat, pertama, memelihara ketertiban hukum yang menyangkut kompetensi relatif -

¹¹Departemen Agama, *Op. Cit*, h. 190

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. Ke 3, h. 113

kewilayahan- dari Pegawai Pencatat Nikah. Kedua, menghindarkan pemalsuan atau penyimpangan hukum lainnya, seperti identitas calon mempelai, umur dan status perkawinan mereka, termasuk misalnya kemungkinan terjadinya perbedaan agama yang mereka anut. Lebih dari itu, dalam kaitannya dengan program pemerintah yang ingin membangun dan mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas, penelitian umur calon mempelai sangat penting. Karena tidak jarang terjadi - terutama di kampung-kampung yang memegang kuat tradisi bahwa mempunyai anak perawan tua/kasip dapat menjadi aib – pemalsuan umur sering terjadi. Belum lagi kemungkinan dampak yang timbul, akibat kawin muda yang mendominasi banyaknya banyaknya kasus perceraian di beberapa Pengadilan Agama. Karena itulah ketelitian pegawai pencatat menjadi faktor kunci, agar tidak terjadi penyimpangan. Dan yang tidak kalah pentingnya, lurah atau kepala desa yang dianggap mengetahui identitas, atau usia calon mempelai, peranannya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemalsuan sangat besar¹³.

Dalam syari'at Islam tidak diatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat tentang muamalah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia mengaturnya¹⁴.

Memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan tersebut adalah syarat administratif.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, h. 107

Artinya perkawinan tetap sah karena standar sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melakukan kelalaian kewajibannya, maka pihak yang lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja keadaan demikian bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri¹⁵.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum, juga mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan suatu perkawinan. Ada dua manfaat dari pencatatan perkawinan: yakni manfaat preventif dan represif.

Manfaat preventif yaitu, untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan¹⁶. Termasuk dalam hal ini adalah menaggulangi adanya perkawinan di bawah umur.

Seorang pegawai pencatat nikah harus menolak kehendak nikah apabila menurutnya dalam pemeriksaan kehendak nikah terdapat pelanggaran baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Caranya adalah dengan memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya (Model N9).

¹⁵ *Ibid*, h. 110

¹⁶ *Ibid*, h. 111

Atas penolakan tersebut pihak yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan dengan acara singkat (sumir), menguatkan penolakan, atau memerintahkan pernikahan dilangsungkan.

Jika Pengadilan Agama memerintahkan pernikahan dilangsungkan, maka penghulu/ pembantu PPN harus melaksanakan perintah tersebut¹⁷.

Mengenai nikah yang tidak diumumkan juga merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal 3, 8 dan 10 ayat (1) disebutkan:

Pasal 3:

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 10 ayat (1)

¹⁷ Departemen Agama R.I, *Op. Cit*, h. 45

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini¹⁸.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah jelas mengatur bahwa pengumuman kehendak nikah harus dilakukan selama sepuluh hari kerja, dan akad nikah baru dapat dilaksanakan setelah sepuluh hari tersebut, kecuali apabila terdapat alasan yang sangat penting, maka diharuskan mendapat dispensasi dari Camat atas nama Bupati.

Menurut Sudarsono, tujuan pengumuman kehendak nikah adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk menegetahui dan mengajukan keberatan-keberatan jika menurut pendapat mereka ada hal yang bertentangan dengan hukum agama atau peraturan perundang-undangan lainnya, seperti suami masih mempunyai istri dan lain sebagainya¹⁹.

Seharusnya penghulu/pembantu penghulu tidak melaksanakan akad nikah sebelum samapai 10 hari sejak pemberitahuan kehendak nikah, walaupun dengan alasan pasangan tersebut nikah lari, karena ada wewenang penghulu/pembantu penghulu untuk menolaknya, dan menyuruh calon pengantin tersebut untuk mengurus dispensasi dari camat atas nama Bupati Kepala Daerah, agar pelaksanaan akad nikah dapat dilaksanakan walaupun belum sampai 10 hari sejak pemberitahuan kehendak nikah oleh calon mempelai.

Ketentuan pengumuman kehendak nikah ini mempunyai tujuan yang baik, karena dengan pengumuman kehendak nikah, pihak yang merasa ada pelanggaran

¹⁸ Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, h. 547-549.

¹⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), Cet. 1, h. 46

dalam pernikahan pasangan ini, dapat mengajukan keberatannya, karena itulah pengumuman kehendak nikah ini haruslah dilaksanakan.

Namun demikian masyarakat juga seharusnya tidak melakukan nikah lari, karena akan berpeluang melanggar undang-undang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tetapi ketegasan dari penghulu/pembantu penghulu menjadi kata kunci agar pengumuman kehendak nikah dapat dilaksanakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi melalui beberapa tahap, yaitu pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan buku nikah.
2. Faktor penghambat dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi adalah: pasangan yang nikah lari. Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Pegawai yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi hanya berjumlah dua orang, sehingga banyak tugas yang tidak terselesaikan dengan semestinya. Faktor penghambat yang terakhir yaitu pengetahuan Pembantu penghulu dan masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan rendah. Para pembantu penghulu di desa-desa kebanyakan adalah alumni pesantren, yang dalam pendidikannya menekankan pendidikan agama. Secara umum, pengetahuan pembantu penghulu terhadap hukum perkawinan menurut Islam cukup memadai. Sebaliknya pengetahuan mereka terhadap peraturan dan perundang-undangan perkawinan yang berlaku masih rendah, begitu juga dengan masyarakat.

3. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berjalan dengan semestinya, namun banyak hambatan dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga ditakutkan akan terdapat pelanggaran, terutama karena kurangnya pegawai KUA kecamatan Lembah Sorik Marapi.

B. Saran

Penulis menyamapaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah lebih banyak melakukan pelatihan-pelatihan kepada pembantu penghulu.
2. Kepada pemerintah hendaknya melakukan pemerataan pegawai di kantor urusan Agama, terutama di desa-desa agar hambatan dalam pencatatan perkawinan bisa dikurangi
3. Masyarakat juga diharapkan untuk berperan untuk mengetahui dan mematuhi peraturan pemerintah tentang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), terj. Abdul Majid Khon, cet. Ke. 1
- Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke. 1
- A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. Ke 1
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. Ke 1
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi Dan Yurisprudensi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. Ke 3
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Ke. 1
- Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. Ke 2
- Basyir Azhar H.A., *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1999) Cet. Ke 7
- Departemen Agama R.I, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004)
- Departemen Agama R.I, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008)
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perakwinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989) terj. Agus Salim, Cet. Ke. 3
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994).

Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada), 2005

Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Cet. Ke 1

Rohan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. Ke 2

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), Cet. Ke 2

DAFTAR LAMPIRAN

1. PEDOMAN WAWANCARA
2. PEDOMAN OBSERVASI
3. REKOMENDASI GUBERNUR RIAU
4. REKOMENDASI GUBERNUR SUMUT
5. REKOMENDASI BUPATI MANDAILING NATAL
6. REKOMENDASI CAMAT LEMBAH SORIK MARAPI
7. REKOMENDASI KEPALA KUA LEMBAH SORIK MARAPI

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa orang pegawai dan apa saja tugas masing-masing pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi?
2. Apa tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi?
3. Bagaimana tata cara pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi?
4. Apa saja yang menjadi penghambat/kendala dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Lembah Sorik Marapi?
5. Tahukah bapak dengan undang-undang perkawinan dan PP nomor 9 tahun 1975?
6. Pernahkah dilakukan sosialisasi undang-undang perkawinan?

ANGKET PENELITIAN

PETUNJUK:

- A. Angket ini digunakan untuk keperluan ilmiah
 - B. Jawaban yang bapak/ibu berikan tidak akan berpengaruh apapun terhadap bapak/ibu
 - C. Kejujuran bapak/ibu dalam memberikan jawaban merupakan keberhasilan kami dalam mengumpulkan data
 - D. Buatlah tanda silang pada salah satu abjad jawaban di bawah ini, kalau menurut bapak/ibu merupakan jawaban yang benar.
 - E. Isilah titik-titik yang telah disediakan bila jawaban yang Bapak/ibu maksud belum tertera.
-

- 1. Apakah pelaksanaan nikah bapak/ibu dicatat penghulu?
 - a. ya
 - b. tidak
- 2. Tahukah bapak/ibu bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, seharusnya diumumkan terlebih dahulu selama 10 hari?
 - a. tahu
 - b. tidak tahu
- 3. Apakah kehendak pernikahan bapak/ibu diumumkan oleh penghulu?
 - a. ya
 - b. tidak
- 4. Berapa lama jarak antara pemberitahuan kehendak nikah bapak/ibu kepada penghulu dengan waktu pelaksanaan akad nikah?
 - a. kurang dari 10 hari
 - b. 10 hari
 - c. Lebih dari 10 hari
 - d. Tidak tahu
 - e.
- 5. Berapa umur bapak/ibu yang sebenarnya ketika melaksanakan akad nikah?
Suami : tahun

Istri :tahun
- 6. Bagaimana proses nikah bapak/ibu?
 - a. Nikah lari
 - b. Nikah biasa